

# ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

**Marwan Gultom<sup>1</sup>**

Pengawas PAI Pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan

---

## Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

Administrasi dalam pemerintahan Islam ada sejak nabi Muhammad saw. Administrasi Negara diatur oleh nabi sendiri. Ada urusan keuangan, perbendaharaan, perundangan, surat menyurat, menulis wahyu dan urusan sipil. Administrasi dalam pemerintahan Abu Bakar masih hampir sama dengan praktek yang dilakukan Rasulullah. Pada masa Umarlah administrasi dalam pemerintahan Islam mulai tertata dengan mendirikan kantor pemerintahan, reformasi peradilan, membentuk kantor ketentaraan. Pada masa Usman bin Affan tidak terjadi perubahan bidang peradilan, dia mengangkat pegawai dan pejabat istrik serta hakim di kota-kota di wilayah kekuasaannya

**Keywords:** Administrasi, Pemerintah Islam

(\*) Corresponding Author: Marwan Gultom

**How to Cite:** Administrasi Pemerintahan Islam. (2021).ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

---

## PENDAHULUAN

### Prinsip-Prinsip Pemerintahan Nabi Muhammad

Pada masa permulaan Islam atau masa kerasulan Muhammad saw sama dengan masa turunnya wahyu yang dibagi ke dalam dua periode sejarah. *Pertama*, periode Mekkah yaitu sejak beliau menerima wahyu pertama sampai beliau hijrah ke Madinah (622 M). *Kedua*, periode Madinah yaitu sejak hijrah 622 M sampai wafat 12 Robi'ul Awal 11 H/632 M. Selama periode Mekkah pengikut Muhammad saw hanya sekelompok kecil, belum menjadi komunitas yang mempunyai wilayah tertentu dan kedaulatan. Sayuthi Pulungan, (1996:1)

D.B. MacDonald sebagaimana di kutip Pulungan mengatakan :”Disini Madinah telah terbentuk negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Dalam negara Madinah itu, dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala negara dan menjadi referensi untuk memformulasikan prinsip-prinsip dalam mengatur masyarakat untuk model negara semacam itu, yang masyarakatnya bercorak pluralistik. Nabi tidak menetapkan sistem dan bentuk pemerintahan, perangkat-perangkatnya dan struktur kekuasaan, termasuk di dalamnya administrasi. Dalam teks piagam Madinah dalam memimpin penduduk Madinah, al-Qur'an pun tidak menetapkan sistem dan bentuk pemerintahan. Ketika mengelompokkan ayat-ayat al Qur'an Muhammad 'Izzat Darwazat menyimpulkan bahwa tidak terdapat ayat – ayat al-Qur'an yang menyebut sistem dan bentuk negara dalam Islam.

Harun Nasution berpendapat bahwa baik sistem pemerintahan maupun pembentukannya tidak ada ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutnya secara tegas. Dalam ilmu politik ada tiga unsur utama yang inheren bagi suatu kumpulan

manusia untuk dapat disebut sebagai masyarakat yang sebenarnya atau masyarakat politik yaitu adanya wilayah tertentu yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan rasa aman dan mengamalkan ajaran agamanya, adanya kesadaran sosial untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan umum, dan adanya otoritas politik yang legal dalam masyarakat bersangkutan yang mampu memelihara perdamaian dan memajukan masyarakat yang dibentuk itu. Dalam kajian ilmu politik disebutkan bahwa tugas-tugas kepala negara untuk mencapai tujuan negara antara lain membuat undang-undang dan peraturan-peraturan serta melaksanakannya, menghukum orang yang bersalah, meminta nasihat dan pertimbangan dari orang-orang yang dipandang cakap dan mengetahui hal-hal tertentu. G.S. Diponolo, (1975:55)

Meriam Budiarjo, (1989:45-46) berpendapat setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak yang diperlukan oleh kepala negara yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan dan memelihara kemungkinan serangan dari luar dan menegakkan keadilan. Muhammad mempunyai kemampuan untuk menyampaikan visi kepada orang-orang sekitarnya sehingga mampu mengubah konsep lama dengan konsep baru. Ira, (1990:52)

Pertama-tama kita perlu menengok pada periode Muhammad dan pengganti beliau. Ketika Beliau di Mekkah sama sekali tidak menyinggung mengenai masalah pemerintahan atau negara. Husain, (1993:16) Adapun dalam periode Medinah ditetapkan kaidah-kaidah asasi bagi kehidupan keluarga, masalah warisan, perdagangan serta jual-beli. Belakangan dijabarkan oleh para ahli fiqh. Hanya saja dalam kaidah-kaidah asasi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan moral tidak dipaparkan dengan rinci, sehingga bisa dijadikan patokan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan. Dengan sendirinya tidak ada pula pembahasan masalah sistem pemerintahan secara langsung.

Nabi Muhammad saw tidak mengubah sedikitpun sistem yang beragam yang ada sebelumnya itu. Beliau juga tidak meletakkan kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam. Yang beliau anggap penting adalah mengirim utusan yang pandai dan mumpuni dalam bidang agama ke berbagai suku dan kota yang telah menyatakan diri memeluk Islam. Tugas utama adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

### **Sistem Administrasi Pemerintahan Islam pada Masa Muhammad saw**

Kaum muslimin memandang al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang paling pokok dan utama. Kekuasaan tertinggi di atas dunia ini dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an terletak ditangan Rasulullah. Meskipun demikian Rasulullah menumbuhkan tradisi musyawarah dengan para sahabatnya dalam memecahkan berbagai persoalan penting.

Ketika Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah dan semenjak itulah Muhammad mulai menyusun pemerintahannya. Mengatur administrasi dan membagi-bagi tugas negara menurut perkembangan kondisi dan situasi saat itu. Baik administrasi atau organisasi pemerintah masih sederhana, tetapi cukup menjamin kelancaran urusan pemerintahan. Di dalam masyarakat Islam, Muhammad saw bukan hanya nabi dan rasul tetapi juga pemimpin, panglima perang, hakim tertinggi, pembuat undang-undang, dan pimpinan administrasi pada umumnya. Dialah yang mengatur sistem pergaulan sosial, undang-undang dan hukum yang bersumber dari al-Qur'an; dan dia pula yang menjalankan undang-undang dan hukum-hukum itu. Disamping itu, dia membentuk ketentaraan, menata, dan memimpinnya, serta menguasai tanah dan mengatur kepemilikannya.

Madinah adalah ibukota negara. Administrasi Negara dan daerah-daerah kekuasaan diatur langsung oleh Nabi Muhammad saw. Negeri Arab, pada masa Rasulullah dibagi menjadi beberapa distrik (*muqatha'ah*), yaitu Madinah, Tayma', al-Jund, Distrik Bani Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadhramaut, Oman, dan Bahrain. Disetiap distrik itu Nabi Muhammad saw menempatkan seorang *al-wali* (gubernur, penguasa lokal) yang diberi wewenang menegakkan dan menjalankan hukum, serta mengatur urusan peradilan. Badri Ytaim, (1989:5)

Disamping gubernur, Nabi juga menunjuk pejabat disetiap distrik itu yang bertugas mengumpulkan zakat dan sedekah. Dalam hal ini, Nabi juga bertindak sebagai hakim agung yang berkedudukan di Madinah. Sebagai hakim agung, hanya Nabi yang mempunyai wewenang menunjuk hakim-hakim untuk setiap distrik itu atau mendelegasikan wewenang itu kepada *al-wali* untuk menunjuk orang yang pantas menduduki jabatan hakim itu. Sebagian besar hakim itu adalah ahli-ahli fikih atau orang-orang salih seperti Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal.

#### 1. Pemerintahan Desentralisasi

Di zaman jahiliyah, tiap-tiap kabilah itu mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri, Muhammad hendak menyusun agar seluruh kabilah bertanggungjawab kepadanya. Kepala kabilah-kabilah oleh Muhammad di lantik. Pelantikan itu dilaksanakan bila utusan kabilah berkunjung ke ibukota Madinah dan menyatakan kesetiannya. Thaha, (1955:11) Muhammad tidak pernah mengangkat kepala kabilah dari putra kabilah yang lain, karena akan menimbulkan sentimen yang tidak-tidak. Muhammad selalu memilih wali-walinya dengan ukuran keahlian dan ketakwaan.

#### 2. Tugas Kepala Kabilah

Dalam ujudnya Muhammad menciptakan sistem baru dalam pemerintahan. Dia hendak meratakan nikmat ilahi kepada seluruh manusia, yaitu nikmat materi, nikmat rohani berupa keamanan, kesehatan, penghargaan dan pengetahuan. Adapun tugas kepala Kabilah adalah:

- a. Mengutamakan pendidikan umat
- b. Menjamin keuangan negara

- c. Menyamaratakan seluruh kaum muslimin baik dahulunya ia penyembah berhala, Kristen atau Yahudi
  - d. Memberikan jaminan kebebasan beragama kepada seluruh rakyat
  - e. Bersikap bijaksana, lemah lembut, sebaiknya tegas dan keras bila perlu, dengan tujuan guna menjamin keselamatan masyarakat dengan berpedoman kepada ajaran Tuhan.
  - f. Memperbesar kegembiraan bekerja dan memberi pengharapan baik bagi orang yang beramal
  - g. Menjamin keadilan dan keamanan
3. Dewan Permusyawaratan Muhammad

Muhammad adalah Rasulullah, dia juga kepala negara yang aktif dan bertanggungjawab. Oleh karena Islam berdasarkan musyawarah maka Muhammad bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang bijaksana yang beriman kuat dan juga jujur. Contoh musyawarah pada masa itu adalah sesudah peperangan Badr, tentara Islam dapat menawan 70 pembesar Quraisy. Di dalam permusyawaratan Muhammad saw meminta pendapat sahabat tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap para tawanan. Abu Bakar mengatakan bahwa tawanan itu boleh ditebusi uang. Tetapi Umar berpendapat karena pembesar-pembesar itu berbahaya, maka dibunuh saja. Rasul memilih pendapat Abu Bakar lalu Tuhan menegur Rasulullah. Karena belum ditunjuk oleh rakyat seperti sekarang hanya jasa-jasa mereka yang memberikan tempat kepada mereka dan Muhammad yang menunjuk dan membawa mereka bermusyawarah.

#### 4. Tata Usaha

Negara menghendaki pembagian tata usaha yang teratur. Urusan perbendaharaan dan keuangan, urusan sipil (muamalah), urusan perundingan, perdamaian, urusan surat menyurat ke luar negeri, urusan menuliskan wahyu dan urusan isha atau statistika semuanya telah diatur.

#### 5. Pembagian Tugas dan Administrasi

Muhammad membagi membagi surat-menyurat kepada sahabat-sahabat menurut kesanggupannya. satu cabang yang terpenting dalam surat-menyurat adalah menulis al-Qur'an, pembagian itu adalah:

- 1. Menuliskan al-Qur'an
- 2. Pembukuan rampasan perang
- 3. Urusan 'usyr
- 4. Urusan harta zakat
- 5. Urusan muamalah
- 6. Urusan menuliskan perdamaian dan syarat-syaratnya
- 7. Surat-menyurat untuk umum

Muhammad telah melahirkan cara baru di dalam sistem pemerintahan yaitu sistem kesatuan yang tidak memisahkan antara negara dan agama. Masjid sebagai tempat suci sekaligus sebagai Dewan Permusyawaratan dan

Dewan Pemerintahan. Di masjid seluruh persoalan hidup dan pemerintahan diselesaikan dan dimusyawarahakan.

#### 6. Keuangan Pemerintah

Muhammad menetapkan iuran negara yang mesti dipungut dari rakyat. Pungutan itu menurut ketentuan iuran negara yang diambil dari kaum muslimin dan non-muslim. Iuran negara ditetapkan atas ternak, hasil bumi yang mengenyangkan dan dari tanah dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Fa'i
2. Kharaj
3. Jizyah
4. Sedekah/zakat

#### 7. Pertahanan

Ketetapan Piagam Madinah mengenai prinsip pertahanan terkandung dalam pasal 37,44,24 dan 38 yang menyatakan adanya hak dan kewajiban segenap rakyat Madinah dalam usah mewujudkan pertahanan besama dan bersama-sama mengeluarkan belanja perang selama mereka menghadapi perang bersama untuk mempertahankan keamanan kota Madinah. Ketetapan ini wajar agar tercipta situasi aman dan tentram.

#### 8. Peradilan

Nabi Muhammad bertindak sebagai hakim dia berugas sebagai penengah dalam konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Hal itu jelas tertera dalam piagam Madinah yang berbunyi;” ...orang-orang yang terikat dengan piagam ini, apabila terjadi konflik diantara mereka yang dikhawatirkan dapat membawa kerusakan di dalam masyarakat, maka persoalannya akan dikembalikan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah”. Pada masa Rasulullah tidak ada hakim kecuali Nabi Muhammad, ketika itu masyarakat berada dalam sistem kemasyarakatan yang masih sederhana, belum mengalami kemajuan dan perkara-perkara yang diajukan kepadanya juga masih sedikit.

### **Administrasi Pemerintahan pada Masa Abu Bakar**

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, administrasi terpusat pada diri khalifah sendiri. sebagaimana Muhammad saw, Khalifah Abu Bakar merupakan seorang pembuat undang-undang (*legislatif*) dan pelaksananya (*eksekutif*) dan dia juga bertindak sebagai penegak hukum (*yudikatif*). Hukum-hukum yang dikeluarkan terutama bersumber dari al-Qur’an dan dari nilai-nilainya yang longgar dan melapangkan. Dia mendelegasikan sebagian kewajibannya kepada sahabat antara lain Umar bin Khatab menjadi wali kota Madinah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai pimpinan Baitul Mal. Dia tidak menunjuk sekretaris khusus, apabila diperlukan dia menugaskan Zaid bin Tsabit, Usman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris. Mereka melaksanakan tugas tanpa gaji. Dia membagi

wilayah kekuasaan negara Islam menjadi beberapa wilayah yaitu :Mekkah, Madinah, Thaif, Shan'a, Hadhramaut, Khaulan, Zabid, Zuma' dan al- Jund, Najran, Jarasy dan Bahrain. Sebenarnya sebagian negeri Irak dan Syiria sudah ditaklukkan, namun karena pemerintahannya sangat singkat belum diatur dalam administrasi yang berpusat di Madinah.

Dalam melaksanakan tugasnya Khalifah dibantu oleh *ahl al-Syura* (majlis permusyawaratan) yang terdiri dari para sahabat besar bertempat di Masjid Nabawi. Kadang-kadang majlis ini melibatkan para tokoh masyarakat kota madinah,kepal-kepala kabilah badui yang ditus kesana, dan orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi untuk ditimba aspirasinya. Majlis-majlis itu dipimpin oleh seorang dari Muhajirin atau Anshar. Praktek sosialisme Abu Bakar sama dengan yang dijalankan Rasul yakni hasil zakat dan sedekah ditampung di baitul mal dan digunakan untuk segala keperluan pemerintahan, militer dan kepentingan lainnya. Dana yang tersisa dibagi-bagikan secara merata.

#### **Administrasi Pemerintahan pada Masa Umar bin Khatab**

Para sejarawan sepakat menyatakan bahwa Umar bin Khatab adalah orang pertama yang menata administrasi negara yang baru lahir itu. Dia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki kemampuan yang tinggi, berwibawa, seorang panglima dan sekaligus manajer yang ulung.

Sistem administrasi pada masa Umar menyerupai sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung di Persia dan Bizantium. Para penakluk Arab mendapatkan negeri-negeri baru meskipun sedang mengalami keruntuhan, mempunyai peninggalan sejarah yang bernilai tinggi, dalam bidang kebudayaan, peradaban dan sistem politik. Umar dan kaum muslimin berpendapat bahwa tidak ada salahnya kalau sistem peradaban kebudayaan dan politik itu diterima dan dilestarikan sebagaimana adanya, dengan sedikit perubahan sesuai tuntutan akidah dan kemaslahatan penduduk.

Dengan semangat tinggi Umar berupaya mewujudkan kehidupan yang demokratis dan sistem permusyawaratan. Ketika ingin memutuskan sesuatu Umar bin Khatab mengundang kaum Muslimin untuk hadir di Masjid Nabawi. Pertemuan kadang dalam beberapa hari. Dialog-dialog yang berlangsung di dalam majlis permusyawaratan merupakan tonggak penting yang menopang tegaknya pemerintahan negara Islam.Umar dengan tegas menyatakan tidak akan ada pemerintahan tanpa musyawarah. Baik secara teoritis maupun secara praktis.musyawaah sejak saat itu menjadi titik sentral sistem pemerintahan negara Islam.

Disamping majlis permusyawaratan tersebut ada satu peringkat lembaga musyawarah lain yang anggotanya terdiri dari Ali bin Abi Thalib,Usman bin Affan, Abd Rahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidilah, Zubair bin Awam untuk diajak musyawarah persoalan-persoalan harian.

Umar bin Khatab membagi wilayah kekuasaan menjadi delapan propinsi yaitu : Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah (Mesopotamia, lembah antara Sungai Eufrat dan Tigris), Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Kalau pada masa pendudukan Bizantium Palestina dibagi 10 distrik Umar membaginya dua distrik yaitu Ailah dan Ramlah. Setiap distrik mempunyai pemerintahan sendiri. Mesir dibagi menjadi Mesir atas (al Sha'id) dan dibagi 28 distrik dibawah pimpinan Abdullah bin Sarrah dan kedua Mesir Bawah dibagi menjadi 15 distrik dibawah Amr bin Ash sekaligus sebagai Gubernur Mesir. Persia Umar tetap mempertahankan pembagian yang berlaku sebelumnya pada masa Sasania, yaitu Faris, Kirman, Khurasan, Makran, Sijistan dan Azerbaijan.

Pada setiap propinsi didirikan kantor pemerintahan yang disebut *Dar al -Imarah* (kantor Pemerintahan Daerah). Kantor ini dikelola oleh orang terpercaya yang terhimpun dalam semacam kantor yang disebut *al-Diwai* (sekretariat). Pejabat-pejabat penting setiap propinsi adalah *al-wali* (gubernur), *al-amil* (kepala distrik), *al-qadhi* (hakim), *katib al diwan* (sekretaris kepala) dan *shahib bait a-l mal* ( kepala jawatan perbendaharaan Negara).Disetiap propinsi dan distrik terdapat petugas khusus antara lain *amil al-kharaj* (pejabat perpajakan) yang bekerja bergandeng tangan dengan gubernur atau kepala distrik.

#### **Administrasi Pemerintahan Pada Masa Usman bin Affan**

Pada masa khalifah Usman bin Affan wilayah Islam semakin luas karena giatnya usaha ekspansi wilayah. Kekuasaan Islam meliputi Syria, Mesir, Kufah, Basrah, Kirgisia, Azerbaijan, Nahawand, Ray, Hamadzan, Isfahan, Halwan Bahrain, Oman masuk propinsi Basrah, Afrika termasuk propinsi Mesir. Tidak terjadi perubahan berarti dalam bidang peradilan.

#### **Administrasi Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib**

Ali bin Abi Thalib ketika menduduki jabatan khalifah tidak melakukan perubahan berarti dalam sistem administasi pemerintahan negara Islam, sebagaimana yang berlangsung pada masa Umar dan Usman. Ali terlalu sibuk untuk menghadapi pemberontakan di dalam negeri, khususnya perang melawan Muawiyah. Dia mengganti banyak pejabat yang diangkat Usman dan berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Usman.

#### **Pemerintahan Bani Umayyah**

Khalifah besar Bani Umayyah ini adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan (661-680 M), Abd al-Malik ibn Marwan (685- 705 M), al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M), Umar ibn Abd al-Aziz (717- 720 M) dan Hasyim ibn Abd al-Malik (724-743 M). Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang

dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkhan, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Malтан.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman al-Walid ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketenteraman, kemakmuran dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah al-Jazair dan Marokko dapat ditundukan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Marokko dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Tariq). Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Kordova, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevi'e, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Kordova. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar ibn Abd al-Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Aburrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bourdeaux, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini.

Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.

Ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (*qadhi*) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, Qadhi adalah seorang spesialis dibidangnya. Abd al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abd al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi

administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abd al-Malik diikuti oleh puteranya Al-Walid ibn Abd al-Malik (705- 715 M) seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid yang megah.

Sepeninggal Umar ibn Abd al-Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah khalifah Yazid ibn Abd al-Malik (720- 724 M). Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketenteraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid ibn Abd al-Malik. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Khalifah berikutnya, Hisyam ibn Abd al-Malik (724-743 M). Bahkan di zaman Hisyam ini muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hasyim yang didukung oleh golongan mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan berikutnya kekuatan baru ini, mampu menggulingkan dinasti Umawiyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, Bani Abbas. Sebenarnya Hisyam ibn Abd al-Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi, karena gerakan oposisi terlalu kuat khalifah tidak berdaya mematahkannya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain adalah

- Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
- Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syi'ah (para pengikut Ali) dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah.
- Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan mawali (non Arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah.

- Lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Disamping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.
- Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas ibn Abd al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah, dan kaum mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.

### **Sistem Administrasi Pemerintahan pada Masa Dinasti Umayyah**

Pemerintahan Khulafaur Rasyidun sudah berakhir pada tahun 40 H. Pejabat-pejabat tinggi negara pada masa Khulafaur Rasyidun terdiri atas: Khalifah (kepala negara), Para gubernur dan Kepala Distrik yang berkedudukan di kota besar, Sekretaris, *Al Hajib* (pembantu khusus khalifah), *Khazin* bertugas mengurus baitul mal, Qadhi, hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan.

#### **1. Bentuk pemerintahan masa Umayyah**

Setelah pemerintahan Islam beralih dari Khulafaur Rosyidun kepada bani Umayyah, pemerintahan Islam menjadi bentuk kerajaan. Sebagaimana penguasa-penguasa Bizantium dan Persia, para penguasa Dinasti Umayyah juga memperlihatkan kekayaan, kemegahan serta menggunakan *al-Khadam* (pelayan), *al-Hasym* (pengiring), *al-hijab* (penjaga pintu) *al-harras* (pengawal). Tiga khalifah terbesar dari Dinasti Umayyah; yaitu Muawiyah, Abul malik sampai Hisyam, masing-masing memerintah dari amaskus sekitar dua puluh tahun dan sekaligus menjai administrator kelas satu, mereka menggunakan gaya pemerintahan Yunani dan Persia. Ketika wilayah Islam semakin luas, orientasi keagamaan dalam pengaturan administrasi kenegaraan mulai bergeser kearah politik. Perkembangan peradaban menuntut para penguasa untuk mencetak mata uang, sehingga diperlukan tempat khusus percetakan uang. Ketika pekerjaan-pekerjaan semakin banyak dibutuhkan spesialisasi-spesialisai pekerjaan. Misalnya dibutuhkan jabatan untuk mencatat pemasukan negara dari pajak dan *jizyah* yang disebut *diwan al kharaj* (kantor pajak), ada juga kantor khusus yang menangani pengeluaran Negara untuk pembiayaan tentara dan sebagainya yang disebut *diwan al zaman al nafaqah*, *diwan al iqtha'* (kantor pertanahan urusan daerah), *diwan al ma'adin* (kantor perdagangan) *diwan al-Jund* (kantor ketentaraan) *diwan al-asathil* (kantor angkatan laut) *diwan al-thugur* (kantor tetara tapal batas) *diwan al-rasail* (kantor surat menyurat atau *diwan a- insya'* (kantor karang mengarang).

#### **1. Imarat Ammah (pemerintahan Umum)**

##### **a. Imarat al-Istikhfa atau Imarat al-Tafwidh**

Pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh khalifah, kepada

pemerintahan ini ditunjuk langsung dari pusat dan kepadanya diserahkan pemerintahan daerah. Adapun tugas dan kewajibannya adalah: a. mengatur tentara, membaginya menjadi beberapa pasukan, dan menentukan gaji mereka, b. mengawasi pemerintahan dan penentuan hakim c. memungut pajak, menghimpun sedekah, menentukan para petugas pajak dan sedekah d. menjaga kemurnian agama e. menjalankan hukum-hukum syara' f. bertindak sebagai imam shalat g. menangani proses pemberangkatan haji. Diantara pejabat dalam bentuk ini adalah Ziyad bin Abihi Gubernur Irak, Ubaidillah, Basya bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf, Yazid bin al-Muhallab, Maslamah bin abd Malik, Umar bin Hurairah, Khalid bin Ubaidillah al-Qisri, Yusuf bin Umar bin Umar al-Tsaqafi, Abdullah bin Umar bin Abd Azizi, Yaziz Umar bin Hurairah.

b. Imarat al-Isti'la

Penunjukan khalifah terhadap seseorang untuk bertindak sebagai pemerintah atas suatu daerah karena terpaksa, artinya seseorang dengan kekuatannya menuntut jabatan dengan kekerasan atas suatu daerah.

2. Imarat al-Khashah

Dalam pemerintahan bentuk ini, tugas pejabat (lokal) yang ditunjuk hanya terbatas pada pengaturan masalah-masalah yang menyangkut hal ihwal tentara dan penguasaan atas rakyat, dan tidak diberi wewenang dalam pengangkatan hakim, pungutan pajak, pengumpulan zakat dan bahkan tidak memimpin shalat.

3. Al-Diwan ( Kantor/Departemen )

Pada masa Bani Umayyah terdapat empat kantor utama yaitu:

- a. Diwan al-Kharaj ( Kantor Pajak )
- b. Diwan al-Rasail ( Kantor Surat Menyurat ), bertugas membina wilayah dan pengiriman surat yang dikeluarkan para gubernur
- c. Diwan al-Iradat al-Munawwarah ( Kantor Pendapatan Negara)
- d. Diwan al-Khatam ( Kantor Arsip Negara)

4. Pegawai Tinggi Masa Bani Umayyah

- a. Al-Amir atau al-Wali (Gubernur)
- b. Petugas Shalat
- c. Petugas Pajak
- d. Amil al-Shadaqah ( pengumpul zakat )
- e. Al-Katib ( Sekretaris ), penulis surat, pencatat pajak, pencatat urusan ketentaraan, kepolisian, dan peradilan. Penulis terkenal masa Bani Umayyah adalah Ziyad bin Abihi, Salim, Abd al-Hamid
- f. Al-Hajib ( pelayan khusus khalifah, pengawal) bertugas menentukan orang-orang yang dapat langsung bertemu dengan Khalifah.

5. Sistem Peradilan

## 1. Peradilan Islam

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah pengaruh asimilasi antara bangsa Arab dan non-Arab sudah mulai terlihat. Peradilan di Mesir dan Syria sebelum Islam yang berlaku adalah hukum Romawi. Karena itu, para hakim harus menetapkan bagian hukum Romawi yang tetap berlaku dan mana yang harus ditolak berdasarkan ajaran Islam. Para khalifah Bani Umayyah tidak begitu mementingkan urusan yang menyangkut syariah, kecuali Umar bin Abd Aziz. Para khalifah tidak berusaha memberi warna khusus dalam persoalan hukum dengan warna syariat resmi. Namun dapat dinyatakan bahwa peradilan masa Bani Umayyah tidak terpengaruh oleh persoalan politik.

## 2. Hisbah ( Peradilan Pasar )

*Al-Muhtasib* bertugas memelihara keberlakuan hukum-hukum syariat, mengontrol aturan-aturan yang berhubungan dengan pasar, pengaturan kaki lima dan pertokoan, mengontrol takaran dan timbangan, mengontrol pengadaan barang, mencegah para guru memukul murid-muridnya.

## 3. Qadha al-Mazhalim ( Peradilan Pidana )

Hakim pidana menikmati kekuasaan yang lebih tinggi daripada hakim (qadhi) dan pengawas pasar (al-muhtasib). Perkara yang tidak mungkin terselesaikan pada tingkat qadhi diserahkan kepadanya, seperti tindak pidana yang dilakukan para petinggi Negara atau tokoh-tokoh masyarakat. Khalifa Bani Umayyah yang pertama kali mendirikan lembaga ini adalah Abd al-Malik bin Marwan. Sidang peradilan dimulai jika dihadiri oleh : Al-Humam wal a'wan (penjaga dan tokoh masyarakat), al-Qudhah wal hukkam ( hakim dari pemerintah), al-fuqaha (ahli fikih), al-Kuttab (sekretaris), al-Syuhud ( para saksi).

## 4. Al-Syurthah (polisi) adalah aparat keamanan yang ditugaskan khalifah atau gubernur untuk menegakkan keamanan, disiplin, dan menangkap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan perusak.

## 6. Sistem Ketentaraan

Wajib militer diberlakukan pada pertengahan masa pemerintahan Bani Umayyah. Dengan adanya program wajib militer, tentara Islam sejak itu terdiri dari dua golongan yaitu tentara profesional dan sukarela. Armada laut meliputi Armada Syria, berpusat di al-Laziqiyah, Armada Afrika, berpusat di Tunis, Armada Mesir berpusat di Iskandaria, Armada Nil berpusat di Babilon, Armada khusus di muara sungai Nil untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan Bizantium terhadap pesisir wilayah Islam.

## **Pemerintahan pada Masa Dinasti Bani Abbasiyah**

Kekuasaan dinasti Bani Abbas, atau Khilafah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M). Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode:

1. Periode Pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode Kedua (232 H/847 M-334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki pertama.
3. Periode Ketiga (334 H/945 M-447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
4. Periode Keempat (447 H/1055 M-590 H/1194 M), masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
5. Periode Kelima (590 H/1194 M-656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdad.

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.

Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750-754 M. karena itu, pembina sebenarnya dari daulat Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M). Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syi'ah yang merasa dikucilkan dari kekuasaan. Untuk mengamankan kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu per satu disingkirkannya. Abdullah bin Ali dan Shalih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir, karena tidak bersedia membaiatnya, dibunuh oleh Abu

Muslim al-Khurasani atas perintah Abu Ja'far. Abu Muslim sendiri karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya, dihukum mati pada tahun 755 M.

Pada mulanya ibu kota negara adalah al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, al-Mansyur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, Bagdad, dekat bekas ibu kota Persia, Clesiphon, tahun 762 M. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini al-Manshur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat Wazir sebagai koordinator departemen, Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara disamping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibn Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat. Pada masa al-Manshur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah.

Pada masa al-Manshur pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama Annii Sulthan Allah fi Ardhihi (sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi-Nya)". Dengan demikian, konsep khilafah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagaimana pada masa al-Khulafa' al-Rasyiduun. Disamping itu, berbeda dari daulat Umayyah, khalifah-khalifah Abbasiyah memakai "gelar tahta", seperti al-Manshur adalah "gelar tahta". Abu Ja'far. "gelar tahta" itu lebih populer daripada nama yang sebenarnya.

Kalau dasar-dasar pemerintahan Dinasti Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Manshur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, yaitu al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (775- 786 M), Harun al-Rasyid (786-809 M), al-Ma'mun (813-833 M), al-Mu'tashim (833-842 M), al-Wasiq (842-847 M), dan al-Mutawakkil (847-861 M). Pada masa al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Terkecuali itu dagang transit antara Timur dan Barat juga banyak membawa kekayaan. Bashrah menjadi pelabuhan yang penting.

Popularitas Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan puteranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Disamping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti al-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah, salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Al-Mu'tashim, khalifah berikutnya (833-842 M), memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan, keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa daulat Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah berhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat.

Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syi'ah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan. Semuanya dapat dipadamkan.

Dari gambaran di atas Bani Abbaiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Disamping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tak terdapat di zaman Bani Umayyah.

1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab. Dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini.

2. Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah.
3. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya, belum ada tentara khusus yang profesional.

Sebagaimana diuraikan di atas, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Dalam bidang pendidikan, misalnya, di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat:

1. Maktab/Kuttub dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan; dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, seperti tafsir, hadits, fiqh dan bahasa.
2. Tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana.

Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan itu paling tidak, juga ditentukan oleh dua hal, yaitu:

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.
2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa Khalifah al-Manshur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan manthiq. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah al-Ma'mun hingga

tahun 300 H. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.

Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode, penafsiran pertama, *tafsir bi al-ma'tsur*, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Kedua, *tafsir bi al-ra'yi*, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadits dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode *bi al-ra'yi*, (tafsir rasional), sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqh dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut.

Imam-imam mazhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Imam Abu Hanifah (700-767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadits. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf, menjadi *Qadhi al-Qudhat* di zaman Harun al-Rasyid.

Dalam bidang optikal Abu Ali al-Hasan ibn al-Haythami, yang di Eropa dikenal dengan nama Alhazen, terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya bendalah yang mengirim cahaya ke mata. Di bidang kimia, terkenal nama Jabir ibn Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Di bidang matematika terkenal nama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata "aljabar" berasal dari judul bukunya, *al-Jabr wa al-Muqobalah*. Dalam bidang sejarah terkenal nama al-Mas'udi. Dia juga ahli dalam ilmu geografi. Diantara karyanya adalah *Muuruj al-Zahab wa Ma'aadzin al-Jawahir*.

Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat, antara lain al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibn Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat. Yang terkenal diantaranya ialah al-Syifa'. Ibn Rusyd yang di Barat lebih dikenal dengan nama Averroes,

banyak berpengaruh di Barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan Averroisme.

Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak adaandingannya di kala itu. Pada masa ini, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan dan kegemilangan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran.

### **Administrasi Pemerintahan pada Masa Dinasti Abbasiyah**

#### 1. Al Wizarah (kementerian ) pada Bani Abbasiyah

Peran utama wazir adalah sebagai penghubung antara khalifah dengan rakyat. Para menteri pada Periode Abbasiyah I (132-218 H), mempunyai keistimewaan tertentu. Selain sebagai penghubung antara khalifah dan rakyat tetapi juga sebagai pelaksana hokum, mengatur strategi perang, menata administrasi ketentaraan dan memberi informasi kepa khalifah berkenaan engan peristiwa yang perlu diketahui oleh khalifah. Dalam perkembangan pemerintahan Dinasti Abbasiyah , menteri ada dua bentuk yaitu wazir al-tafwidh dan wazir al-tanfidz

#### 2. Pemerintahan lokal

Dalam masalah pemerintah lokal atau propinsi, Dinasti Abbasiyah tetap melanjutkan sistem pemerintahan lokal yang sudah dijalankan pemerintah Bani Umayyah. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa gubernur dan penguasa distrik Bani Umayyah berkebangsaan Arab sedangkan inasti Abbasiyah sudah tidak lagi mengharuskan gubernur atau kepala distrik dari kalangan Arab. Dengan adanya jabatan mentari (wazir) wibawa gubernur mulai menurun. Masa Bani Umayyah gubernur mempunyai kedudukan tertinggi setelah khalifah. Pada masa dinasti Abbasiyah kedudukan tertinggi setelah khalifah adalah menteri baru gubernur.

#### 3. Perkantoran Baru pada Masa Dinasti Abbasiyah

Khalifah Abbasiyah I, Abu al-Abbas berusaha menata perkantoran yang banyak itu. Arsip-arsip yang terpencar-pencar di setiap kantor, disatukannya. Khalid al-Barmawi adalah orang pertama yang menghimpun arsip-arsip setiap kantor dalam satu buku khusus. Khalifah Abbasiyah kedua, al-Manshur mendirikan sebuah kantor khusus untuk mencatat nama-nama orang dari Bani Umayyah yang hartanya disita. Kantor ini namanya *diwan al-Mushadarat*. Khalifah al-Mahdi pada tahun 162 H mendirikan bebarapa kantor kecil yang dinamakan dawawin al-azimah (kantor-kantor pengendali) yang bertugas melakukan inspeksi dan

mengontrol proses kerja kantor-kantor lain. Kemudian mendirikan diwan al-mazhalim (kantor pidana) yang bertugas meneliti pengaduan rakyat tentang tindak pidana yang dilakukan gubernur. Harun al-Rasyid mendirikan *diwan al-Shawafi* (kantor pengurusan tanah). *Diwan al-dhiya* (kantor pengeluaran) kantor yang menangani masalah pengeluaran khalifah dan keluarganya. Al-Ma'mun mendirikan *diwan al-Jihbiyyah* kantor pemeriksa keuangan. *Diwan al-istikhraj* yang bertugas meneliti kebenaran isu-isu tentang adanya para menteri, sekretaris negaa, pengawal khalifah, gubernur dan pejabat daerah lainnya yang melakukan sogok-menyogok dan pungutan liar.

#### 4. Sistem Peradilan

Para khalifah Bani Abbasiyah tidak begitu memperhatikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan peradilan sehingga para hakim merdeka dalam memutuskan perkara sesuai dengan pengetahuannya tentang al-Qu'an, Sunnah, pendapat para sahabat dan praktek peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Tetapi Khalifah Bani Abbasiyah menjalankan upacara-upacara keagamaan berusaha mendekati para ahli fikih dan ulama dengan tujuann memberi warna keagamaan kepada tindakan dan hukum negara. Para ahli fikih jadi khawatir, khalifah atau gubernur akan mempengaruhi fatwa mereka. Pada masa Nabi Muhammad sampai masa Bani Umayyah, proses peradilan berlangsung di masjid. Pada masa Bani Abbasiyah para hakim diperkenankan mendirikan tempat khusus untuk melangsungkan proses peradilan. Pada masa al-Khulafau Rasyidun dan Bani Umayyah para hakim tidak mengenakan pakaian khusus. Masa bani Abbasiyah memakai toga hitam (warna kebesaran Bani Abbasiyah) dan topi hitam panjang. Masa Khularaur Rasyidun dan Bani Umayyah , khalifah menunjuk hakim tetapi masa Bani Abbasiyah hakim ditunjuk oleh hakim agung. Adanya hakim agung itu sistem peradilan mengalami kemajuan. Kalau masa Khulafau rasyidun sampai Bani Umayyah satu hakim di kota tertentu tidak aa hubungannya dengan hakim di kota lain. Masa Bani Abbasiyah semua hakim yang bertugas di ibu kota propinsi berada di bawah koordinasi hakim agung.

#### 5. Sistem Ketentaraan

##### 1. Keseimbangan antara Arab dan Persia

Kebanyakan bangsa Arab merasa lebih senang berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah, karena wana kearaban politik mereka. Khalifah Bani Abbasiyah kedua, Abu Ja'far berusaha menjaga keseimbangan Arab dan Persia.

##### 2. Sistem Tentara Budak

Para tentara berasal dari golongan budak. Bani Abbasiyah memeperolehnya dengan cara membeli budak-budak dai tempat-tempat yang jauh. Mereka dilatih secara terorganisir. Mereka disamping mendapat

latihan militer, juga mendapat didikan secara Islam dan diajarkan pengetahuan keagamaan Islam. Ahtas seorang tentara budak yang sangat berjasa diangkat oleh al Mu'tashim sebagai gubernur Mesir. Karena kemenangannya melawan Byzantium.

## KESIMPULAN

Administrasi dalam pemerintahan Islam ada sejak nabi Muhammad saw. Administrasi Negara diatur oleh nabi sendiri. Ada urusan keuangan, perbendaharaan, perundingan, surat menyurat, menulis wahyu dan urusan sipil. Administrasi dalam pemerintahan Abu Bakar masih hampir sama dengan praktek yang dilakukan Rasulullah. Pada masa Umarlah administrasi dalam pemerintahan Islam mulai tertata dengan mendirikan kantor pemerintahan, reformasi peradilan, membentuk kantor ketentaraan. Pada masa Usman bin Affan tidak terjadi perubahan bidang peradilan, dia mengangkat pegawai dan pejabat istrik serta hakim di kota-kota di wilayah kekuasaannya. Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada perubahan yang berarti karena sibuk untuk meredam pemberontakan yang terjadi. Para penguasa Dinasti Umayyah juga memperlihatkan kekayaan, kemegahan serta menggunakan *al-Khadam* (pelayan), *al-Hasym* (pengiring), *al-Hijab* (penjaga pintu) *al-Harras* (pengawal). Ketika wilayah Islam semakin luas, orientasi keagamaan dalam pengaturan administrasi kenegaraan mulai bergeser kearah politik. Misalnya dibutuhkan jabatan untuk mencatat pemasukan negara dari pajak dan *jizyah* yang disebut *diwan al-Kharaj* (kantor pajak), ada juga kantor khusus yang menangani pengeluaran Negara untuk pembiayaan tentara dan sebagainya yang disebut *diwan al-Zaman al-Nafaqah*, *diwan al-Iqtha'* (kantor pertanahan urusan daerah), *diwan al-Ma'adin* (kantor perdagangan) *diwan al-Jund* (kantor ketentaraan) *diwan al-Asathil* (kantor angkatan laut) *diwan al-thugur* (kantor tetara tapal batas) *diwan al-Rasail* (kantor surat menyurat atau *diwan al-Insya'* (kantor karang mengarang). Pemerintahan Dinasti Abbasiyah mendirikan lembaga baru pemerintahan yaitu al wizarah disamping itu juga mendirikan kantor-kantor dwaminal azimah, diwan zaman azimah, diwan shawafi, diwan a dhiya, diwan *al jihbidzah* (kantor pemeriksa keuangan), *diwan al istikhraj*.

## DAFTAR PUSTAKA

Badri Yatim, (1989) *Sejarah Kebudayaan Islam II* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka.

G.S Diponolo, (1975) *Ilmu Negara, Jilid I* .Jakarta: Balai Pustaka.

[http : //: wiki.myquran.org/index.php/Bani\\_Umayyah+administrasi\\*](http://: wiki.myquran.org/index.php/Bani_Umayyah+administrasi*)

- Ira .M. Lapidus, (1990) *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meriam Budiarjo, (1989) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia.
- Muhamad Husein Heikal, (1993) *Pemerintahan Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nashruddin Thaha, (1955) *Pemerintah Islam zaman Muhammad* Djakarta: Widjaya
- Nasution, (1985) Islam dan Sistem pemerintahan sebagai Yang berkembang Dalam Sejarah” dalam Studia Islamika, Nomor 17 Tahun VII, Juli 1985, LP IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 12
- Suyuthi Pulungan, (1996) *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo.